

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Diplomasi Islam merupakan salah satu periode dalam evolusi diplomasi yang keberadaannya telah menyumbang bagian penting terhadap bangunan diplomasi modern sekarang ini. Islam pernah menjadi suatu kekuatan yang besar selama sekitar 700 tahun, bahkan diplomasi Islam telah meletakkan prinsip-prinsip diplomasi yang belum pernah dipraktekkan negara-negara Barat. Namun diplomasi Islam justru tidak masuk atau belum masuk sebagai kajian akademis, khususnya pada ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar bangsa dan juga diplomasi.

Padahal agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam urusan ibadah, aqidah, syariah, muamalah, maupun mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya mengajarkan mengenai tata cara bermuamalah kepada Allah swt. (*hablumminallah*) sebagai sang Khaliq, bermuamalah kepada sesama manusia (*hablumminannas*), dan bermuamalah kepada makhluk Allah swt. lainnya.

Diplomasi yang telah dipahami sekarang ini memiliki makna bahwa konsep diplomasi yang telah terbentuk berkaitan dengan kehendak suatu negara untuk mencapai kepentingannya dengan cara-cara damai. Akan tetapi jika cara damai tidak terwujud, maka yang selanjutnya bermain adalah kekuatan, dalam hal

lain, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan diplomasi erat kaitannya dengan kekuatan persenjataan.

Akan tetapi lain halnya dengan diplomasi yang dilakukan Rasulullah saw. pada saat dirinya menjadi pemimpin pemerintahan Islam. Diplomasi dalam Islam lebih mengedepankan kesepakatan untuk damai dalam perundingan, sehingga hampir tidak ada pihak yang dirugikan. Diplomasi yang dilakukan Rasulullah saw. sangat memperhatikan harkat martabat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk hidup saling berdampingan satu sama lain, tenang, dan damai.

Sehingga penulis tertarik untuk menelaah salah satu bentuk muamalah manusia terhadap manusia lainnya, yaitu mengenai cara suatu negara berdiplomasi dengan negara lain, karena belum banyak penulis atau peneliti yang fokus melakukan penelitian dalam hal ini. Oleh karena itu, alasan penulis memilih judul “Diplomasi Islam pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw. di Madinah”, yaitu untuk memberi gambaran realitas mengenai diplomasi yang dilakukan Rasulullah saw. Bahwa di dalam Islam telah nyata sebuah konsep diplomasi Islam dengan prinsip yang baik, mulia, serta mengedepankan kesepakatan untuk damai dalam perundingan. Sehingga diharapkan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya menjadi bertambah pengetahuannya mengenai konsep berdiplomasi dalam Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi para diplomat khususnya dalam melakukan tugasnya, sehingga tidak selalu mengacu pada cara

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini, terdapat beberapa tujuan di antaranya :

1. Mengetahui konsepsi dan prinsip-prinsip diplomasi dalam Islam yang telah dilaksanakan dan dibangun Rasulullah saw. sebagai pemimpin umat dan pemerintahan Islam pada masa pemerintahannya di Madinah.
2. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan yang kemudian digunakan dalam menjelaskan dan menggambarkan diplomasi yang terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah saw. di Madinah.
3. Memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S.1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Diplomasi sebagai alat suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya, pada perkembangannya yang terjadi di zaman modern saat ini identik dengan diplomat yang memancarkan pesona dan kegantengan, licin dan penuh akal menipu, kelicikan, bujukan dan pujian yang sifatnya menipu, yang semuanya diyakini berakar dari tradisi Yunani. Demikian hingga diplomasi mempunyai kesan yang tidak baik, bahwa terdapat hubungan yang erat antara diplomasi dengan kekuatan atau perang. Atau dapat diartikan bahwa perang merupakan sarana lain dari diplomasi jika negosiasi menemukan jalan buntu.

Diplomasi gaya modern dalam prakteknya ternyata lebih diminati oleh negara-negara di dunia, karena dengan *backup* perang-militer mereka akan lebih bisa menekan pihak lawannya untuk menghendaki kebijakan yang dibuat. Bukan hanya negara-negara yang termasuk dalam kawasan Dunia Barat, namun demikian pula negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Dunia Islam. Terdapat beberapa negara di dunia Islam yang hidup bergandengan dengan Barat, sebagai contoh Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang memiliki kekuatan nasional paling besar di Timur Tengah, tetapi modal minyak yang dimilikinya tidak berhasil membendung pengaruh Amerika Serikat bagi negaranya.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan Arab Saudi semata karena tanpa para ahli dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat, eksplorasi maupun pemasaran minyak yang dimiliki Arab Saudi tidak akan berarti dan tidak akan memberikan keuntungan apa-apa. Sehingga seperti terjadi sebuah ketergantungan Arab Saudi terhadap AS. Dengan demikian, ketika salah satu negara di dunia Islam lainnya mengalami krisis ataupun konflik yang terdapat hubungannya dengan AS, diplomasi yang dilakukan Arab Saudi cenderung mendukung atau tidak menentang kebijakan yang telah dibuat AS. Demikian pula dengan Turki. Turki di bawah pemerintahan pro-Barat tidak mendukung solidaritas Arab yang mayoritas merupakan negara Islam, sehingga Turki turut berandil dalam mengukuhkan dominasi Israel atas Palestina. Hal ini dilakukan Turki karena faktor kedekatannya dengan AS.

---

<sup>1</sup> Perang Meledak, *Diplomasi AS Kalah Telak* (diakses tanggal 28 November 2007); dari <http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2003/3/20/op2.htm>.

Padahal di dalam hukum politik konsep Islam, suatu negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya muslim, dan syariat Islam ditegakkan, maka terhadap negara lain yang menetapkan hal-hal yang sama dengan negara tersebut (*Darul Islam*), maka hukum saling bekerjasama adalah suatu kewajiban dan memusuhi atau berperang dengannya adalah haram. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara yang sering kali bertentangan dengan negara di Dunia Islam, seperti yang telah dilakukannya terhadap Irak. Irak sebagai negara yang berdaulat telah digulingkan oleh AS. Sehingga dengan berbagai fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa Irak adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim dengan pemimpin yang beragama Islam. Sehingga sebenarnya cara diplomasi Arab Saudi dan juga Turki yang melakukan kerjasama dengan AS adalah hal yang bertentangan.

Hal ini tidak saja terjadi pada Saudi Arab, Mesir juga demikian. Negara yang sejarah politik modernnya paling berpengaruh di Timur Tengah itu, bukan saja menerima pengaruh Barat, tetapi juga bersedia bersalaman dengan Israel, meski kemudian harus dibayar dengan nyawa Presiden Anwar Sadat (terbunuh tahun 1981). Ini dilakukan Mesir demi mendapat Gurun Sinai dari kekuasaan Israel.<sup>2</sup>

Demikian pula terjadi adopsi praktek diplomasi Barat dalam hal penggunaan kekuatan militer oleh beberapa negara di Dunia Islam. Sebagai contoh yaitu pembelian sejumlah alat militer dan persenjataan lainnya yang

mengadakan persenjataan nuklir dan hal ini menjadi ancaman yang serius bagi Arab Saudi. Diberitakan Antara News tanggal 5 Oktober 2007, bahwa Pentagon memberitahukan kepada Kongres, bahwa pihaknya akan menjual sejumlah rudal, kendaraan lapis baja dan pesawat kargo senilai hampir 1,4 miliar dolar kepada empat negara Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, dan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice, menyatakan suatu paket besar penjualan senjata ke wilayah tersebut akan dilakukan untuk menghadapi Iran.<sup>3</sup>

Sehingga implikasi dari pengadopsian praktek diplomasi yang dilakukan beberapa negara di Dunia Islam, di antaranya yaitu keretakan hubungan diplomasi antara negara dalam Dunia Islam, serta semakin meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan alat militer yang dapat digunakan sebagai pertahanan suatu negara. Sehingga saat ini beberapa negara di Dunia Islam berlomba-lomba dalam pemenuhan persenjataannya yang secara langsung mempengaruhi pada meningkatnya anggaran belanja mereka pada pembelian persenjataan.

Sehingga demikian, menjadi sebuah kenyataan bahwa diplomasi gaya modern dalam prakteknya ternyata lebih diminati oleh negara-negara di dunia, sehingga menyisihkan gaya diplomasi Islam. Padahal sesungguhnya, Islam sebagai pemikiran politik memiliki seperangkat aturan main di dalam berhubungan luar negeri, termasuk di dalamnya konsep diplomasi. Demikian sehingga Islam sebagai sebuah ideologi (*mabda'*) dicirikan dengan terdapat pengaturan di dalam Islam mengenai kehidupan bersama (hubungan manusia dengan sesamanya). Cakupan Islam sebagai ideologi adalah *aqidah aqliyah* dan

<sup>3</sup>AS Mungkin Jual Senjata Senilai US\$1,4 Miliar ke Timteng (diakses tanggal 27 Februari 2008); dari <http://www.antara.co.id/arc/2007/10/5/as-mungkin-jual-senjata-senilai-us1-4-miliar-ke-timteng/>

seperangkat hukum-hukum muamalah, serta tata cara bagaimana mengoperasionalkan seperangkat hukum tersebut dalam realitas kehidupan bersama (berbangsa dan bernegara). Demikian pula telah ditulis oleh Hafidz Abdurrahman dalam bukunya *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, di antaranya sebagai berikut: “...secara normatif, kita bisa membuktikan kemampuan Islam sebagai ajaran politik dan spiritual dengan melihat elemen yang dimiliki oleh Islam, yaitu pemikiran (*thought*) dan metode (*method*).”<sup>4</sup>

Sudah menjadi suatu kebenaran yang mutlak bahwa Islam adalah suatu agama yang *kaffah* (menyeluruh) dan *kamil* (sempurna) yang diturunkan Allah swt. kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi *rahmatan lil âlamîn*. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan yang terkait dengan urusan duniawi, seperti, bagaimana mengatur sistem perekonomian, penegakan hukum, konsep politik termasuk di dalamnya konsep diplomasi, dan sebagainya.

#### D. Permasalahan

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana konsepsi dan prinsip-prinsip diplomasi dalam Islam yang telah dibangun Nabi Muhammad saw. pada masa kepemimpinannya di Madinah?”

## E. Konsep Pemikiran

Untuk menjawab fenomena tersebut, penulis menggunakan konsep (*concept*) sebagai ujung tombak bagi unit analisa ini. Konsep sendiri diartikan sebagai salah satu simbol paling penting dalam bahasa. Menurut Mochtar Mas'ood konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Sehingga konsep sebenarnya merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan atau fenomena tertentu, bukan fenomena itu sendiri. "Ia bukan sesuatu yang asing. Kita menggunakannya sehari-hari untuk melambangkan suatu kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan bagi kita."<sup>5</sup> Seperti sebuah kata 'Globalisasi', ia bukanlah makhluk yang mempunyai motivasi kebutuhan, atau naluri. Ia bukan fenomena aktual, ia hanya abstraksi dari fenomena.

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi ketika Rasulullah saw. menjadi pemimpin pemerintahan Islam yang menjalankan diplomasi kepada kelompok atau bangsa-bangsa lain pada masa pemerintahannya di Madinah, akan digunakan Konsep Diplomasi dan Politik Luar Negeri, serta aplikasi Konsep Diplomasi dalam Islam. Kerangka-kerangka pemikiran ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan diplomasi yang telah dilakukan Rasulullah saw. pada masa pemerintahannya.

Diplomasi merupakan sebuah alat atau sarana bagi suatu negara dalam pelaksanaan hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain. Atau dengan

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas'ood, *Hal-hal yang Penting dalam Diplomasi dan Metodologi* (Jakarta:



kata lain diplomasi merupakan alat suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Diplomasi sendiri seperti halnya dengan alat, mesin atau instrumen lainnya adalah netral, terlepas dari nilai-nilai apakah bermoral atau tidak bermoral (immoral). Penggunaannya (pelaksanaannya) dan nilainya tergantung dari maksud tujuan dan kemampuan, kemahiran atau kecakapan dari mereka yang melaksanakannya.<sup>6</sup>

Berbagai definisi mengenai diplomasi telah banyak terbentuk. *The Oxford English Dictionary* memberi konotasi sebagai berikut : “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat”.<sup>7</sup> Adapun KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan, “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”.<sup>8</sup> Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa :

Diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>9</sup>

Sehingga diplomasi suatu negara dapat dikatakan berhasil jika negara tersebut dapat meyakinkan atau menarik pihak-pihak lain yang terlibat kepada suatu pandangan yang sama seperti yang dikehendaki negara yang sedang melakukan diplomasi atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kompromi.

---

<sup>6</sup> Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1988), hal. 162.

Apabila kompromi yang sedang dilakukan suatu negara dapat memuaskan pihak-pihak yang terkait tersebut, maka dapat dikatakan diplomasinya sangat berhasil, demikian pula sebaliknya.

Adapun mengenai konsep Politik Luar Negeri, perlu dibedakan antara politik luar negeri (*foreign policy*) dengan diplomasi. J.R. Childs dalam bukunya *American Foreign Service*, (Holt, 1948) mengatakan :

*The foreign policy of a state is the substance of foreign relations, whereas diplomacy proper is the process by which policy is carried out.*

(Politik luar negeri dari suatu negara adalah merupakan isi pokok dari hubungan luar negerinya, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan politik itu).<sup>10</sup>

Sehingga dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa diplomasi menyediakan mesinnya, juga alat perlengkapannya serta pejabat-pejabat atau petugas-petugasnya untuk melaksanakan politik luar negeri. Tujuan dari diplomasi, seperti halnya politik luar negeri adalah untuk melindungi dan menjamin keamanan suatu negara dengan cara-cara damai jika memungkinkan. Tetapi jika cara damai gagal, maka penggunaan kekuatan atau ancaman merupakan sarana lain dari diplomasi, sehingga perang tidak dapat dihindarkan.

Adapun Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai berikut : *“Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest.”*<sup>11</sup>

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai

<sup>10</sup> Suwardi Wiriadmadja, *op. cit.*, hal. 164.

<sup>11</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relations Dictionary* (USA: Binchertand

tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Politik luar negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan luar negerinya.<sup>12</sup> Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Dari uraian di atas, maka politik luar negeri biasa digunakan atau terjadi apabila interaksi yang dilakukan dalam bentuk hubungan terhadap masyarakat internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional, demikian juga seperti apa yang dikemukakan oleh KJ. Holsty :

Pokok permasalahan dalam penentuan kebijakan luar negeri pada umumnya dititikberatkan pada usaha untuk memecah berbagai masalah persoalan yang berhubungan dengan masalah dalam negeri maupun luar negeri.<sup>13</sup>

Sehingga dengan konsep Diplomasi dan Politik Luar Negeri tersebut, diharapkan dapat menjelaskan praktek diplomasi yang terjadi antara negara-negara sekarang ini, termasuk di dalamnya praktek diplomasi beberapa Negara Islam.

Islam sebagai sebuah agama dan ideologi, ajarannya mengandung pula mengenai aplikasi konsep diplomasi tersebut. Islam merupakan agama yang

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>13</sup> KJ. Holsty, *International politics : A Framework for Analysis*, diterjemahkan Imam Sudrajat, (Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1982), hal. 175

universal yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mempunyai konsep tentang politik tanpa terkecuali diplomasi. Dengan lahirnya Islam terbentuklah suatu perubahan secara revolusioner yang menancapkan prinsip hukum internasional dan diplomasi.

Allah swt. berfirman di dalam Surat Al-Hujuraat:13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal."*

Dari ayat tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa yang membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya tidak lain adalah derajat ketakwaannya kepada Allah swt. Sehingga semua negara dan manusia, tanpa memandang agama dan rasnya, dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga dalam berbagai kondisi, setiap negara harus berperilaku baik terhadap negara lain, selalu menghargai satu sama lain, dengan landasan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam menjaga dan mendapatkan keamanan di dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad saw. di bumi ini sebagai *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Di bidang politik ajaran Islam

*lil'alam* tersebut, misalnya dalam hal politik yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Di dalam sejarah dikenal berbagai bentuk pemerintahan. Namun Islam secara tegas tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karena itu setiap bangsa atau negara diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahannya masing-masing sesuai kehendak dan keyakinannya. Namun yang terpenting bahwa bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat.

Di dalam Islam nilai-nilai yang mengandung ajaran untuk berdiplomasi yang sesuai dengan firman Allah swt. cukup banyak ditemukan. Sebagai ahli pikir politik muslim, Ibnu Khaldun berpendapat tentang diplomasi yang dihubungkan dengan persoalan agama. Ia berpendapat bahwa agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah penduduk. Sebabnya adalah karena semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh satu negara terhadap negara lainnya, dan menuntun mereka ke arah kebenaran.<sup>14</sup>

Abdul Hamid A. Abu Sulaiman di dalam bukunya *Perhubungan Antarabangsa Menurut Teori Islam* menggunakan istilah *siyar* sebagai makna perhubungan antarabangsa. Menurut pengertian Al Sarakshi, *As Siyar* bermaksud:

meneruskan perilaku orang muslimin dalam hubungan mereka dengan kaum kafir dalam wilayah musuh dan juga dengan orang-orang yang mempunyai taraf *musta'man* (dijamin keamanan) sementara ataupun kekal

sebagai *dhimmi* di bumi umat Islam dengan *murtaddun* (golongan murtad) dan *baghun* (pemberontak negara Islam).<sup>15</sup>

Secara umum, *siyar* termasuk peraturan-peraturan dalam pergaulan tamadun dengan bangsa-bangsa dan negara-negara yang tinggal bersahabat dengan umat muslimin yang dibedakan dalam Al Quran dengan orang-orang yang bermusuhan. Jelasnya *siyar* adalah sebagian dari khazanah Fiqh para alim ulama' terdahulu yang ahli di bidang politik dan kenegaraan.

Di dalam sebuah artikel disebutkan bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan Fiqh *As Siyar*.<sup>16</sup>

Menurut beberapa penulis Islam, agen dan perwakilan diplomatik dalam istilah-istilah disebut juga *rasul* (jamak: *rosul*) atau *musafir* (jamak: *sufara*). Istilah *rasul* berasal dari kata *irsal* yang secara harfiah berarti menyampaikan dan termasuk di dalamnya mengirim wakil yang diperintahkan untuk menjalankan misi-misi khusus. Jadi istilah *rasul* mempunyai pengertian yang mirip dengan pengertian istilah nabi atau utusan. Pengertian *safir* berasal dari kata *safar* yang berarti, dalam kerangka melengkapi fungsi dan peranan *rasul* dalam kegiatan konsolidasi dan pemantapan perdamaian. Dalam prakteknya, kedua istilah tersebut seringkali dipergunakan secara bergantian dan dapat dipertukarkan, meskipun

<sup>15</sup> *Tuduhan Ketiga : Rasulullah dengan Dasar Tertutupnya terhadap Ketamadunan Lain* (diakses tanggal 23 Februari 2008); dari <http://munawwarah.blogdrive.com/comments?id=48>.

<sup>16</sup> *Fiqh As Siyar* (diakses tanggal 28 Februari 2008); dari <http://muslim.or.id/artikel/fiqh->

belakangan para penulis menekankan penggunaan *safir* untuk perwakilan-perwakilan diplomatik dan di bidang keagamaan pengertian utusan adalah *rasul*.<sup>17</sup>

Agama Islam menganggap perbuatan diplomasi merupakan bagian dari menjalankan politik luar negeri, yang berarti menjadi bagian yang penting dari kedaulatan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara. Kedaulatan itu di dalam pelaksanaannya terbagi dua:<sup>18</sup>

- a. Dalam negeri, yang disebut dengan *siyadah dakhiliyah* yang bertugas di dalam penyelesaian segala permasalahan dalam negeri.
- b. Luar negeri, yang disebut dengan *siyadah kharijiyah* yang menjalankan politik luar negeri dan hubungan-hubungan internasional.

Sehingga demikian, konsep diplomasi dalam Islam terdapat di dalam *siyadah kharijiyah* yang menjalankan fungsinya berkaitan dengan politik luar negeri dan hubungan-hubungan internasional. Kemudian yang terjadi adalah persoalan luar negeri semakin penting kedudukannya di dalam negara, maka menimbulkan prinsip lain yang tidak kurang pentingnya, yaitu pengakuan luar negeri terhadap suatu negara.

Dalam pelaksanaannya, praktek diplomasi Islam didasarkan pada keikhlasan dengan tujuan semata-mata untuk:

- a. Berdakwah.
- b. Membebaskan penindasan kezaliman pemerintahan lain.

---

<sup>17</sup> Kuswanto (penterj), *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), hal. 200.

<sup>18</sup> Gusman, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Al-Ghadi, 1982), hal. 100.

- c. Menyadarkan manusia bahwa Allah swt. yang layak disembah dan bukannya tuan-tuan hamba dan raja-raja yang zalim.
- d. Menyebar sistem sosial Islam yang unggul.
- e. Merealisasikan keseluruhan tuntunan Al Quran.

Diplomasi telah diterapkan oleh Islam secara mendasar tidak hanya berupa tujuan perdamaian sepanjang keadilan perang dihargai dan dianggap sebagai hubungan yang normal antara Islam dan bangsa-bangsa lain. Pada awal perkembangan Islam, diplomasi merupakan salah satu bagian dari sebuah peperangan atau bahkan menggantikan perang. Diplomasi digunakan juga sebagai cara untuk mengirim pesan dari pihak Islam sebelum perang dimulai atau digunakan untuk mengadakan pertukaran tawanan perang.<sup>19</sup>

Diplomasi bagi Rasulullah saw. merupakan sarana untuk mencapai tujuan, dan beliau menganggap sarana itu sama pentingnya dengan tujuan. Jika tujuan tersebut mulia, maka ia tidak bisa dicapai dengan mempergunakan sarana yang tidak suci dan tidak mulia. Sehingga Rasulullah saw. memberikan basis moral pada diplomasi dan seni negosiasi.<sup>20</sup>

Sehingga dengan menggunakan konsep diplomasi dan aplikasi dari konsep diplomasi dalam Islam, diharapkan akan membantu penulis untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip diplomasi yang telah dilaksanakan dan dibangun Rasulullah saw. sebagai pemimpin pemerintahan Islam di Madinah.

---

<sup>19</sup> Kuswanto (penterj), *op. cit.*, hal. 199.



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan cara *Library Research* yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang disarikan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar, artikel ilmiah dan internet, serta beberapa informasi yang mendukung pada penelitian.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dari penulisan ini membatasi pada terjadinya praktek-praktek diplomasi Rasulullah saw. sebagai pemimpin pemerintahan Islam pada periode Madinah. Dan di dalam menjelaskan praktek diplomasi Barat yang telah diadopsi oleh beberapa negara di Dunia Islam, maka penulis batasi mengenai lingkup negara Barat yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah negara Amerika Serikat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dan dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berhubungan. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari :

**Bab I** Berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan

penelitian, latar belakang masalah, permasalahan, kerangka dasar teori

teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Berisi tentang pemaparan mengenai beberapa negara di Dunia Islam yang mengadopsi praktek diplomasi Barat atau modern, serta penjelasan implikasi dari adopsi tersebut.

**Bab III** Berisi tentang Islam sebagai sebuah pemikiran politik mempunyai perangkat aturan main di dalam berhubungan luar negeri termasuk di dalamnya konsep diplomasi, pembagian negara menurut Islam, politik luar negeri menurut Islam, dan hubungan internasional menurut Islam.

**Bab IV** Berisi tentang prinsip-prinsip diplomasi dalam Islam, tujuan dan metode diplomasi, bentuk-bentuk diplomasi Rasulullah saw. beserta praktek-prakteknya pada masa pemerintahan Islam di Madinah, pernyataan perang Rasulullah saw., serta arti penting diplomasi.

**Bab V** Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**ADOPSI PRAKTEK DIPLOMASI BARAT**  
**OLEH BEBERAPA NEGARA DI DUNIA ISLAM**

Pada bab ini dipaparkan tentang pemaparan mengenai beberapa negara di Dunia Islam yang mengadopsi praktek diplomasi Barat atau modern, serta penjelasan implikasi dari adopsi tersebut.

**A. Praktek Diplomasi yang Berorientasi pada Tekanan Militer**

Pada saat ini, praktek diplomasi modern ala Barat lebih diminati oleh kebanyakan negara, bukan hanya negara-negara yang termasuk dalam kawasan Dunia Barat, namun demikian pula negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Dunia Islam. Terdapat beberapa negara di Dunia Islam yang mengadopsi praktek diplomasi yang dilakukan negara Barat khususnya AS. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa negara di kawasan Dunia Islam yang secara tidak langsung telah mengadopsi praktek diplomasi tersebut.

**1. Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan nasional paling besar di Timur Tengah, tetapi modal minyak yang dimilikinya tidak berhasil membendung pengaruh Amerika Serikat bagi negaranya.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan Arab Saudi semata karena tanpa para ahli dari Amerika Serikat atau

---

<sup>1</sup> *Perang Meledak, Diplomasi AS Kalah Telak* (diakses tanggal 28 November 2007); dari

negara-negara Barat, eksplorasi maupun pemasaran minyak yang dimiliki Arab Saudi tidak akan berarti dan tidak akan memberikan keuntungan apa-apa. Sehingga seperti terjadi sebuah ketergantungan Arab Saudi terhadap AS. Dengan demikian, ketika salah satu negara di dunia Islam lainnya mengalami krisis ataupun konflik yang terdapat hubungannya dengan AS, diplomasi yang dilakukan Arab Saudi cenderung mendukung atau tidak menentang kebijakan yang telah dibuat AS.

Sementara itu sebagian analisis melihat bahwa hubungan Iran dan Arab Saudi sedang mengarah pada kondisi yang buruk. Wahabi garis keras memandang negatif terhadap Iran. Hal itu dikarenakan mayoritas rakyat Iran adalah Syi'ah, begitu juga dengan pemerintahnya. Pembelaan Iran terhadap kelompok-kelompok Syi'ah, membuat Barat merasa khawatir. Arab Saudi juga punya kekhawatiran yang sama. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sekitar 10 sampai 15 persen rakyat Arab Saudi adalah Syi'ah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kebanyakan dari mereka hidup di kawasan-kawasan kaya minyak.

Dengan memprovokasi 15 persen orang-orang Syi'ah, maka minyak yang menjadi tulang punggung perekonomian Arab Saudi menjadi guncang. Keguncangan ini akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian dunia. Ini dipahami betul oleh pejabat-pejabat Arab Saudi dan juga Amerika. Terdapat indikasi bahwa kerjasama AS dan Arab Saudi ditujukan untuk membendung provokasi Iran terhadap warga Syi'ah di Arab Saudi.

Jika ditelusuri dari berbagai kesepakatan atau perjanjian yang telah terjadi

mereka. Perjanjian pertahanan AS seperti: *North Atlantic Treaty*, *Anzus Treaty*, pada perjanjian tersebut dituliskan bahwa AS berkewajiban mempertahankan dan melindungi Arab Saudi dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam dan luar negara Arab Saudi (dalam perjanjian tersebut juga disebut kewajiban yang sama untuk negara di Timur Tengah). Implementasi dari kesepakatan untuk melindungi Arab Saudi tersebut adalah Amerika mengirimkan 439 penasehat militer, ditambah 10.369 AL dan marinir dari armadanya ke Arab Saudi.

Mey Kartyono seorang wartawan militer, mengatakan bahwa Arab Saudi selain mengandalkan arsenal dan kekuatan militer, Saudi juga sangat menggantungkan pembinaan hankamnya pada Amerika. Bahkan Saudi memberikan kepercayaan penuh dalam menyusun sistem pertahanan elektronik sepanjang 1126,3 KM kepada AS.

Beberapa Majalah militer menyebutkan bahwa kekuatan Saudi dengan persenjataan tersebut, menempatkannya sebagai negara yang kuat di Timur Tengah. Akan tetapi terdapat kekecewaan di kalangan kaum muslimin terhadap Arab Saudi yang tidak menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Palestina, atau digunakan untuk membantu Libanon yang notabenenya sebagai sesama bangsa Islam yang seharusnya dibantu.<sup>2</sup>

Perkembangan selanjutnya yang terjadi yaitu kawasan Arab Teluk menjadi pangkalan militer Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar yang bisa dikerahkan untuk menyerang Iran, yang dituduh Washington dan sekutunya, Israel,

---

<sup>2</sup> *Domini Cannēs Zionis Amerika Adalah Manhaj Salafi Wahabi* (diakses tanggal 23

menggunakan program energi sipil sebagai selubung rencananya untuk membuat senjata nuklir.

Arab Saudi dan negara-negara Teluk lain berbagi kekhawatiran dengan AS mengenai meningkatnya kekuatan Iran di dunia Arab. Meski sikap resmi mereka menentang setiap aksi militer, analis mengatakan bahwa Arab Saudi membantu militer AS dalam perang Irak pada 2003.<sup>3</sup> Sehingga dengan kedekatan Arab Saudi dengan AS dianggap oleh beberapa kalangan sebagai kekuatan bandingan terhadap Iran yang secara tidak langsung telah mengusik kepentingan AS dan Sekutunya di Timur Tengah.

Sebagai informasi lain, diberitakan Antara *News* tanggal 5 Oktober 2007, bahwa Pentagon memberitahukan Kongres, bahwa pihaknya mungkin akan menjual sejumlah rudal, kendaraan lapis baja dan pesawat kargo senilai hampir 1,4 miliar dolar kepada empat negara Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, dan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menyatakan bahwa suatu paket besar penjualan senjata ke wilayah tersebut akan dilakukan untuk menghadapi Iran. Kemungkinan penjualan senjata terbesar yang diumumkan tersebut ditujukan kepada Arab Saudi. Pentagon mengatakan Arab Saudi ingin membeli 61 kendaraan lapis baja ringan dan 50 Humvees bersama dengan berbagai senjata, dan senjata mesin. Departemen Pertahanan dan Lembaga Bantuan mengatakan total penjualan itu senilai 631 juta dolar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Bush Janji Persenjatai Arab Saudi* (diakses tanggal 23 Februari 2008); dari <http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/15/18/75513/bush-janji-persenjatai-arab-saudi>.

<sup>4</sup> *AS Mungkin Jual Senjata Senilai US\$1,4 Miliar ke Timteng* (diakses tanggal 27 Februari 2008); dari <http://www.okezone.com/index.php/ReadStory/2007/10/15/18/75513/bush-janji-persenjatai-arab-saudi>.

## 2. Mesir

Mesir merupakan salah satu negara Arab terpenting yang telah masuk siklus politik AS. Hubungan Mesir dan AS terjadi setelah kesepakatan damai *Camp David* dengan Israel tahun 1979. Nilai-nilai kehidupan AS secara umum cukup mempesona bangsa Arab, khususnya setelah hancurnya imperium Uni Soviet dan kubu komunis pada awal tahun 1990-an.

Negara yang sejarah politik modernnya paling berpengaruh di Timur Tengah ini, bukan saja menerima pengaruh Barat, tetapi juga bersedia bersalaman dengan Israel, meski kemudian harus dibayar dengan nyawa Presiden Anwar Sadat (terbunuh tahun 1981). Ini dilakukan Mesir demi mendapat Gurun Sinai dari kekuasaan Israel.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, diberitakan *Antara News* tanggal 5 Oktober 2007, bahwa Pentagon memberitahukan Kongres, bahwa pihaknya mungkin akan menjual sejumlah rudal, kendaraan lapis baja dan pesawat kargo senilai hampir 1,4 miliar dolar kepada empat negara Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, dan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menyatakan bahwa suatu paket besar penjualan senjata ke wilayah tersebut akan dilakukan untuk menghadapi Iran. Mesir juga memohon untuk membeli 164 rudal Stinger Block I, dan 25 Avenger. Rudal-rudal itu bisa dipasang untuk diluncurkan dari kendaraan lapis baja. DSCA menilai penjualan tersebut mungkin mencapai sekitar 83 juta dolar.<sup>6</sup> Sehingga sama halnya dengan Arab Saudi, dengan peningkatan pemenuhan persenjataan atau alat militer, orientasi yang

---

<sup>5</sup> *Perang Meledak, Diplomasi AS Kalah Telak, op. cit.*

<sup>6</sup> *Antara News, 5 Oktober 2007, "Mesir Memohon Untuk Membeli 164 Rudal Stinger dan 25 Avenger".*

tampak yaitu untuk menghadapi Iran yang dianggap sebagai ancaman serius karena adanya dugaan penyelenggaraan senjata nuklir, yang notabene nya sama-sama negara Islam.

### 3. Turki

Turki di bawah pemerintahan pro-Barat tidak mendukung solidaritas Arab yang kebanyakan merupakan negara Islam, sehingga Turki turut berandil dalam mengukuhkan dominasi Israel atas Palestina. Hal ini dilakukan Turki karena faktor kedekatannya dengan AS.

Mengenai pemberontakan Partai Pekerja Kuridistan (PKK) di Irak, yang telah menewaskan kurang dari 50 tentara Turki, Ankara ingin agar Amerika Serikat menggunakan semua pengaruhnya terhadap aparat Irak dan pemerintah di kawasan Kurdi khususnya untuk menghentikan serangan-serangan dari daerah itu oleh PKK terhadap militer Turki.

Turki mengumumkan telah mengambil beberapa langkah militer, politik, diplomasi dan ekonomi baru terhadap PKK. Meski rincian langkah ekonomi itu tidak diungkapkan, para wartawan mengatakan Turki kemungkinan akan memboikot pemerintah semi otonomi Kurdi di Irak Utara, Pemerintah Daerah Kurdistan, yang oleh Ankara dituduh tidak mengambil tindakan untuk menentang kegiatan PKK. Langkah ini diambil setelah Irak berjanji untuk



memperketat pos pemeriksaan untuk mengganggu pergerakan PKK dan memotong jalur pasokan kelompok ini.<sup>7</sup>

Amerika Serikat juga mengatakan akan meningkatkan bantuan intelijen kepada militer Turki untuk membantu menemukan posisi-posisi PKK. Para pejabat pemerintah Turki menuntut agar kamp-kamp PKK di Irak ditutup dan ingin agar para pemimpin kelompok gerilyawan itu ditangkap.

Kontak senjata pasukan Turki dengan gerilyawan PKK terjadi di Al-Amadiyah, kota di pegunungan yang berjarak sekitar 10 kilometer dari perbatasan di Irak Utara. Sebanyak 24 pemberontak Kurdi tewas karena serangan artileri dan helikopter. Presiden Pemerintahan Daerah Kurdi dalam pernyataannya menyatakan serangan Turki menimbulkan korban sipil Kurdi. Mereka juga menyatakan wilayah Kurdi yang menjadi sasaran serangan di luar pengawasan mereka. Namun, pemerintah Turki menyatakan serangan yang mereka lakukan sudah tepat sasaran.<sup>8</sup> Menurut beberapa kalangan menilai bahwa Turki terlalu dini menggunakan kekuatan senjata untuk mengatasi problem Kurdi karena akan menimbulkan jatuhnya korban dari kalangan sipil.

## **B. Implikasi Adopsi Diplomasi Barat**

Dengan pemaparan fenomena di atas, dapat dilihat bahwa diplomasi yang digunakan oleh negara Barat khususnya AS identik dengan diplomasi yang menekankan pada unsur tekanan persenjataan dibanding dengan upaya

---

<sup>7</sup> *AS dukung Turki soal PKK* (diakses tanggal 13 Februari 2008); dari [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/11/071101\\_kurdsteps.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/11/071101_kurdsteps.shtml).

<sup>8</sup> *Turki Gempur Irak Utara* (diakses tanggal 27 Februari 2008); dari <http://www.seputar-turki.com/turki-gempur-irak-utara.html>.

perundingan dengan cara damai. Hal ini dapat dilihat dari betapa pentingnya negara Barat untuk selalu mewujudkan apa yang disebut dengan arah kebijakan politik dan kepentingan nasional negaranya. Sehingga dengan pengaruh dominasi negara Barat dewasa ini, memberi dampak pula terhadap negara-negara lainnya, seperti negara berkembang juga terhadap negara di Dunia Islam. Salah satu dampaknya yaitu dalam hal pengadopsian secara langsung maupun tidak terhadap model atau pola praktek diplomasi Barat tersebut yang dilakukan beberapa negara di Dunia Islam.

Implikasi yang terjadi kemudian dari pengadopsian praktek diplomasi Barat yang dilakukan beberapa negara di Dunia Islam, di antaranya yaitu keretakan hubungan diplomasi antara negara di Dunia Islam dan semakin meningkatnya perlombaan persenjataan antar negara dalam Dunia Islam.

### **1. Keretakan hubungan diplomasi antara negara di Dunia Islam**

Salah satu gambaran mengenai renggangnya hubungan antar negara di dunia Islam, dapat dilihat ketika Irak menolak kedatangan rombongan delegasi Liga Arab yang diutus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Sharm el-Sheikh, Mesir, tanggal 1 Maret 2003, untuk menunjukkan bahwa negara-negara Arab bersatu dalam menentang serangan Amerika Serikat (AS) ke Irak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Maret 2003. Akibatnya, delegasi yang terdiri dari

Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Musa, terpaksa membatalkan kunjungannya ke Irak.<sup>9</sup>

Bukan itu saja, sebelum Irak menolak kunjungan delegasi itu, Menlu Lebanon dan Menlu Suriah menyatakan bahwa mereka mungkin tidak akan menyertai kunjungan ke Irak. Keduanya khawatir ada sesama rekannya di dalam delegasi yang akan meminta Presiden Saddam Hussein untuk mengundurkan diri. Kekhawatiran kedua Menlu itu dianggap Menlu Mesir berlebihan karena tugas delegasi tersebut adalah menyampaikan pesan dari KTT Arab.

Dari peristiwa di atas memberi indikasi bahwa di antara delegasi dari berbagai negara Arab yang mayoritas merupakan negara Islam tersebut muncul keadaan saling curiga. Sehingga menimbulkan kesan bahwa tingkat solidaritas di antara mereka semakin menurun.

Peristiwa lainnya terjadi dalam forum KTT Liga Arab di Cairo, Mesir, 16 Februari 2003, menjelang KTT Arab di Sharm el-Sheikh pada tanggal 1 Maret tersebut, dan dalam KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Doha, Qatar, 5 Maret. Ketika Pemimpin Libya Muammar Khadafy dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Abdullah Bin Abdul Aziz terlibat pertengkaran dalam forum KTT Arab, serta ketua delegasi Kuwait Menlu Sheikh Sabah Ahmad Al Jabir Al Sabah dan ketua delegasi Irak Wakil Ketua Dewan Revolusi Izzat Ibrahim terlibat adu otot dalam forum KTT OKI.

Sebelumnya, Qatar dan Kuwait telah menolak salah satu butir rekomendasi pertemuan tingkat menteri luar negeri Arab di Cairo. Butir

---

<sup>9</sup> *Masih Adakah Solidaritas Arab?* (diakses tanggal 13 Februari 2008); dari

rekomendasi pertemuan Liga Arab yang ditolak dua negara Arab tersebut adalah yang berbunyi, negara-negara Arab menolak memberi bantuan atau fasilitas untuk sebuah aksi militer yang mengancam keamanan dan keselamatan serta kesatuan teritorial Irak. Seperti yang diketahui bahwa Kuwait yang di negerinya pada saat itu terdapat puluhan ribu pasukan AS dipastikan akan menjadi titik serangan AS ke Irak dari arah selatan. Sedang di Qatar, terdapat pangkalan udara Al Udaid yang menjadi basis pesawat-pesawat tempur AS.

Rangkaian konferensi tersebut sedianya guna menyatukan sikap Arab menghadapi ancaman serangan militer AS dan sekutunya ke Irak, yang pada gilirannya diharapkan mampu mencegah rencana serangan itu. Namun dalam konferensi tersebut, justru terlihat betapa curamnya jurang yang memisah antara kepentingan satu dan lain negara Arab, khususnya antara negara Arab Teluk di satu pihak dan negara Arab non-Teluk di pihak lain.

Bayangan dampak dari invasi Irak ke Kuwait tahun 1990 begitu kuat dalam forum KTT Arab, OKI, dan KTM Liga Arab itu. Sebuah dampak yang memperlihatkan hilangnya semangat solidaritas bangsa Arab. Ironisnya, pertengkaran antara Libya dan Arab Saudi serta antara Kuwait dan Irak justru menyentuh persoalan yang substansial, yakni tentang kehadiran pangkalan dan pasukan AS yang begitu besar di kawasan Teluk.

Dalam konteks itu, negara-negara Arab Teluk yang selama ini menampung puluhan ribu pasukan AS tidak ingin diusik kebijakannya. Sebaliknya, negara-negara Arab non-Teluk selalu mengkritik kehadiran pasukan AS tersebut.

Mendeklarasikan kehadiran AS itu pun menjadi suatu isu yang mengundang

sensitivitas sangat kuat. Isu kehadiran pasukan AS dan asing lainnya itulah yang memicu ketegangan, untuk tidak mengatakan mengguncang konferensi besar Arab.<sup>10</sup>

Fenomena tersebut di atas membuka mata masyarakat internasional bahwa adanya keretakan hubungan diplomasi antara negara dalam Dunia Islam yang pada akhirnya menyebabkan melemahnya bahkan menghilangnya solidaritas di antara mereka.

## **2. Semakin meningkatnya perlombaan persenjataan antar negara di Dunia Islam**

Implikasi paling nyata adalah negara-negara di kawasan Dunia Islam ataupun Timur Tengah berlomba-lomba dalam pengembangan senjata nuklir dan pemenuhan persenjataan. Hal ini dikarenakan pembelian senjata atau impor senjata yang dilakukan oleh satu pihak atau satu negara akan mendorong pula pihak lain yang merasa dirinya memiliki konflik tertentu atau dalam hal ini pihak lawan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini menyebabkan kawasan Timur Tengah merupakan kawasan dunia ketiga yang paling banyak memiliki senjata dan perlengkapan militer dan proses perlombaan senjata itu sampai kini masih terus berlangsung bahkan meningkat.<sup>11</sup> Misalnya saja Arab Saudi dan Mesir yang tidak ingin pengaruh mereka berkurang di negara-negara Arab. Dengan bantuan keahlian dari Pakistan, mereka akan berupaya mengembangkan senjata

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sidik Jatmika, "Politik Timur Tengah" (Bahan Ajar tak diterbitkan Perkuliahan Politik

nuklir untuk mengimbangi Iran. Kemudian Suriah yang mungkin sudah mempunyai satu reaktor nuklir akan punya alasan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Iran merupakan salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, mengemukakan ketertarikannya dalam teknologi nuklir termasuk pengayaan nuklir untuk tujuan damai (sebuah hak yang dijamin dalam perjanjian), tetapi CIA (badan rahasia AS) dan beberapa negara Barat mencurigai bahwa hal tersebut sebenarnya untuk menutupi program untuk pengembangan senjata nuklir dan mengklaim bahwa Iran memiliki sedikit kebutuhan untuk mengembangkan tenaga nuklir, dan secara konsisten memilih opsi nuklir yang dapat menjadi multi penggunaan dibandingkan dengan memilih teknologi nuklir yang hanya bisa digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik. Mantan Menteri Luar Negeri Iran, Kamal Kharrazi secara tegas menyatakan ambisi negaranya dalam teknologi nuklir.

Pada 11 April 2006, presiden Iran mengumumkan bahwa Iran telah berhasil melakukan pengayaan uranium untuk dapat digunakan dalam reaktor untuk pertama kalinya. Pada 22 April 2006, delegasi Iran untuk badan pengawasan nuklir PBB bahwa Iran telah mencapai persetujuan awal dengan Kremlin untuk membentuk sebuah kerjasama dalam pengayaan uranium bersama di wilayah Rusia.<sup>12</sup>

Kemudian mengenai kekuatan Iran yang saat ini semakin meningkat, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lain berbagi kekhawatiran dengan AS mengenai

---

<sup>12</sup> *Kajian Militer Kekuatan Dunia* (diakses tanggal 23 Februari 2008); dari <http://muhammad.or.id/forum/index.php?topic=16671.30:wap2>

meningkatnya kekuatan Iran di dunia Arab. Negara-negara Arab Teluk mengumumkan rencana mereka sendiri untuk membuat energi nuklir bagi kepentingan sipil, yang dipandang sebagai sebuah peringatan bahwa mereka akan membuat senjata atom jika Iran memiliki bom semacam itu. Meski sikap resmi mereka menentang setiap aksi militer, analis mengatakan bahwa Arab Saudi membantu militer AS dalam perang Irak pada 2003.<sup>13</sup>

Berikut adalah data pengeluaran belanja militer beberapa negara di Timur Tengah yang dapat menjelaskan semakin meningkatnya perlombaan persenjataan antar negara dalam Dunia Islam.

**Tabel 2.1. Data Pengeluaran Belanja Militer Beberapa Negara di Timur Tengah**

<b>Iran (Islamic Republic of)</b>			
<b>Year</b>	<b>Military expenditure in b. rials</b>	<b>Military expenditure in constant(2005)US\$ m.</b>	<b>Military expenditure as percentage of gross domestic product</b>
1988	703	1714	3.4
1989	811	1618	3.1
1990	1011	1873	2.9
1991	1235	1954	2.5
1992	1482	1863	2.2
1993	2255	2340	2.3
1994	4023	3176	3.1
1995	4457	2351	2.4
1996	6499	2659	2.6
1997	8540	2977	2.9
1998	10624	3142	3.2
1999	17757	4374	4.1
2000	31113	6695	5.4
2001	38310	7408	5.7
2002	35362	5981	3.8
2003	48291	7013	4.4

<sup>13</sup> Arab Saudi Remehkan Ancaman Militer Iran (diakses tanggal 23 Februari 2008) dari

**Tabel 2.1. Data Pengeluaran Belanja Militer Beberapa Negara di Timur Tengah (lanjutan)**

2004	63073	7982	4.5
2005	81183	9057	5.8
2006	95879	9849	
<b>Saudi Arabia</b>			
Year	Military expenditure in m. rials	Military expenditure in constant(2005)US\$ m.	Military expenditure as percentage of gross domestic product
1988	50080	15252	15.2
1989	47812	14412	13.4
1990	61333	18112	14
1991	61333	17272	12.5
1992	57601	16234	11.3
1993	61692	17205	12.5
1994	53549	14850	10.6
1995	49501	13090	9.3
1996	50025	13069	8.5
1997	67975	17749	11
1998	78231	20500	14.3
1999	68700	18248	11.1
2000	74866	20112	10.6
2001	78850	21421	11.5
2002	69382	18805	9.8
2003	70303	18944	8.7
2004	78414	21060	8.4
2005	95146	25372	8.2
2006	110779	29032	
<b>Yemen</b>			
Year	Military expenditure in b. riyals	Military expenditure in constant(2005)US\$ m.	Military expenditure as percentage of gross domestic product
1988	-	-	-
1989	-	-	-
1990	9.7	789	7.9
1991	12.3	739	8.5
1992	15.7	726	8.2
1993	18.4	628	7.7
1994	28.3	645	9.1
1995	32.9	484	6.4
1996	39.2	441	5.3
1997	51.3	565	5.8
1998	52.2	543	6.2
1999	61.5	589	5.2



**Tabel 2.1. Data Pengeluaran Belanja Militer Beberapa Negara di Timur Tengah (lanjutan)**

2000	76.6	700	5
2001	91.1	744	5.6
2002	130	943	7.2
2003	148	973	7.1
2004	136	793	5.7
2005	193	1009	7
2006	-	-	
<b>Egypt</b>			
Year	Military expenditure in b. riyals	Military expenditure in constant(2005)US\$ m.	Military expenditure as percentage of gross domestic product
1988	4262	3149	6.9
1989	4460	2718	5.8
1990	4521	2359	4.7
1991	5159	2248	4.6
1992	6195	2376	4.5
1993	6803	2328	4.3
1994	7302	2310	4.2
1995	7944	2171	3.9
1996	8016	2044	3.5
1997	8503	2073	3.3
1998	9439	2215	3.3
1999	9881	2249	3.2
2000	10847	2404	3.2
2001	11859	2570	3.3
2002	12741	2688	3.4
2003	13948	2816	3.3
2004	14684	2664	3
2005	15213	2632	2.8
2006	16476	2710	
<b>Turkey</b>			
Year	Military expenditure in b. riyals	Military expenditure in constant(2005)US\$ m.	Military expenditure as percentage of gross domestic product
1988	3.8	6989	2.9
1989	7.2	8086	3.1
1990	13.9	9770	3.5
1991	23.7	10044	3.8
1992	42.3	10564	3.9
1993	77.7	11680	3.9
1994	157	11420	4.1

**Tabel 2.1. Data Pengeluaran Belanja Militer Beberapa Negara di Timur Tengah (lanjutan)**

1995	303	11732	3.9
1996	612	13134	4.1
1997	1183	13684	4.1
1998	2289	14339	4.4
1999	4168	15832	5.4
2000	6248	15322	5
2001	8844	14046	5
2002	12108	13265	4.4
2003	13553	11851	3.8
2004	13386	10778	3.1
2005	13840	10301	2.8
2006	16451	11291	

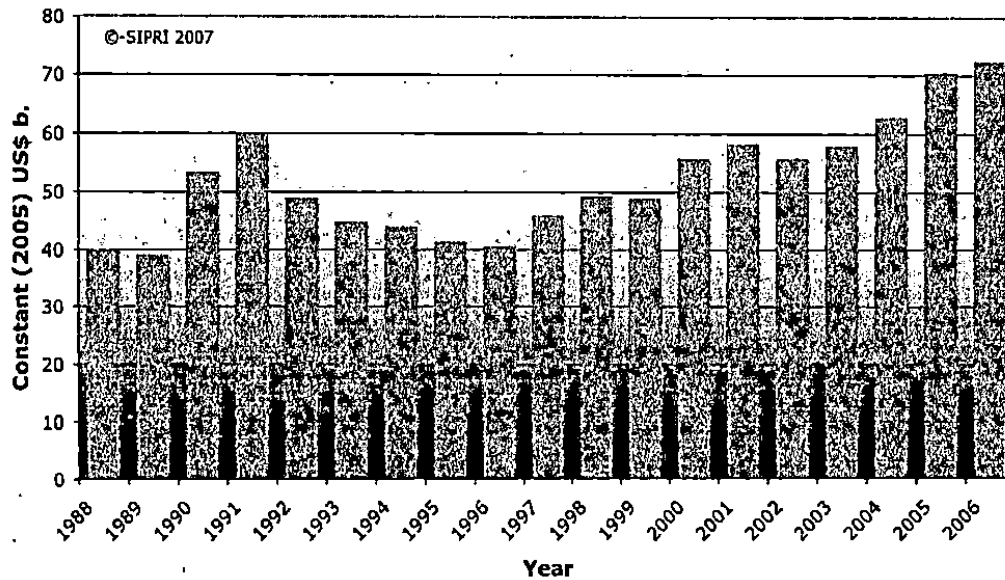
Sumber: SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) *Yearbook 2007*<sup>14</sup>

Kemudian mengenai indikasi terhadap perlombaan pemenuhan persenjataan dan pengembangan senjata di Timur Tengah tersebut dapat dilihat juga dari semakin meningkatnya pembelanjaan militer di Timur Tengah secara keseluruhan. Gambar 2.1 menunjukkan grafik pembelanjaan militer di kawasan timur tengah periode tahun 1988 sampai dengan 2006.

<sup>14</sup> *The SIPRI Military Expenditure Database* (diakses tanggal 31 Januari 2008.); dari

[http://www.sipri.org/press/mt/milex/milex\\_max\\_database1.html](http://www.sipri.org/press/mt/milex/milex_max_database1.html)

### Military expenditure in Middle East, 1988 - 2006



**Gambar 2.1 Grafik Pembelanjaan Militer di Kawasan Timur Tengah**

Sumber: SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) *Yearbook* 2007.<sup>15</sup>

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan persenjataan dan pengembangan senjata di Timur Tengah semakin meningkat dengan dilihat dari semakin meningkatnya pembelanjaan militer di Timur Tengah. Sehingga hal ini akan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di antara beberapa negara Islam di kawasan Timur Tengah yang secara tidak langsung diakibatkan dari pengaruh praktek diplomasi dunia Barat khususnya Amerika Serikat yang seringkali menggunakan tekanan militer dalam melaksanakan diplomasinya.